

**PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DALAM SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL**
Suatu Tinjauan Kritis-Filosofis
Oleh : Muhamad Fauzi*

Abstrak: Pembicaraan tentang pendidikan budi pekerti di sekolah pada tingkat dasar (SD dan SLTP) yang mencuat kepermukaan di era reformasi ini, patut untuk dicermati dan tanggapi secara serius, baik pada dataran idealitas-konseptual maupun realitas operasional. Sebab bila ditinjau secara historis pendidikan budi pekerti sudah lama dilaksanakan di sekolah. Tapi ironisnya, bila mengamati realitas yang ada di masyarakat, pendidikan budi pekerti belum berhasil membentuk dan membina budi pekerti warga bangsa secara umum dan moralitas para pelajar secara khusus. Berangkat dari fakta dan realita tersebut, agaknya perlu untuk meninjau kembali pendidikan budi pekerti yang ada sekarang ini. Tulisan ini mencoba meninjau pendidikan budi pekerti tersebut secara kritis-filosofis tentang konsep, materi dan pendekatannya.

Kata kunci: Pendidikan budi pekerti, filosofis, pendidikan nasional.

Pendahuluan

Fokus tulisan ini adalah menelaah atau menganalisis pendidikan budi pekerti sebagai kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dalam perspektif filosofis. Dalam hal ini mencoba memberikan pandangan kritis mengenai konsep dasar, substansi materi dan pendekatan pendidikan budi pekerti tersebut. Yang menjadi persoalan utama dari ketiga aspek tersebut adalah tentang landasan filosofis penyusunan (*design*) konsep dan muatan kurikulumnya. Dengan kata lain, berdasarkan pemikiran filsafat apakah idealnya konsep dan materi kurikulum pendidikan budi pekerti tersebut dirumus? Apakah pendidikan budi pekerti itu harus bertitik tolak pada pemikiran filsafat Pancasila (nilai-nilai moral Pancasila) atau pemikiran filsafat pendidikan Islam (nilai-nilai akhlak Islam)? ataukah berpijak pada pemikiran filsafat pendidikan Barat (nilai-nilai etika dalam pandangan Barat)? atau justru mengkonvergensi ketiga nilai

* Penulis adalah Dosen Luar Biasa Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, alumnus Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan spesialisasi Pendidikan Islam

filsafat itu? Permasalahan yang dikemukakan terakhir mungkin agak terkesan terlalu *utopis*, alias tidak realistis.

Bertitik tolak dari perspektif filsafat Pancasila (sumber lokal), muatan kurikulumnya akan lebih mencerminkan nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya jika bertitik tolak pada pemikiran filsafat pendidikan Islam (sumber universal), maka nilai-nilai akhlak Islam akan lebih mewarnai muatan kurikulumnya, dan jika berdasarkan pada nilai-nilai etis di Barat mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai dan "budaya ketumuran" bangsa Indonesia.

Persoalan landasan pemikiran filosofis itulah yang paling mendasar untuk dikaji terlebih dahulu. Persoalan ini tampaknya masih memerlukan diskusi yang lebih *intens*. Oleh karena itu, dalam menganalisis permasalahan tersebut diperlukan pendekatan filsafat, sebab menyangkut masalah nilai-nilai moral yang akan diinternalisasi dan ditransformasi serta disosialisasikan kepada peserta didik. Perbedaan pandangan landasan pemikiran filsafat tentunya akan berbeda pula dalam hal menentukan visi dan misi pendidikan budi pekerti, yang selanjutnya dapat berpengaruh pula pada proses pembelajarannya. Hal inilah barangkali yang menyebabkan timbul tenggelamnya pendidikan budi pekerti dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Supriyadi (2001: 1), sebagai suatu materi pendidikan maupun sebuah mata pelajaran, Pendidikan budi pekerti mengalami timbul tenggelam dalam kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan budi pekerti pernah tampil sebagai mata pelajaran yang dominan dalam kurikulum, dan pernah juga diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, seperti berintegrasi dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*), kemudian sekarang terpisah lagi. Perubahan-perubahan itu mencerminkan pandangan para pemikir pendidikan bangsa ini tentang hakikat pendidikan budi pekerti masih belum jelas dan tuntas.

Reaktualisasi Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah

Adapun dorongan utama untuk menekankan lagi pendidikan budi pekerti di lingkungan persekolahan, antara lain karena dirasakan adanya pergeseran dan perubahan sistem-sistem nilai dalam kehidupan masyarakat secara umum, akibat dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta industrialisasi, sehingga membawa perubahan yang sangat mendasar dalam cara berpikir dan gaya hidup individu dan masyarakat. Bahkan perubahan itu telah menembus batas (*passing over*) berbagai aspek dan dimensi kehidupan masyarakat. Dampak dari perubahan itu selanjutnya menyebabkan terjadinya krisis moral (*moral crisis*) yang cukup parah dan meluas menjadi krisis multidimensional (*multidimensional crisis*). Kerusuhan-kerusuhan sosial, pertentangan etnis, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) terjadi di berbagai daerah. Di tingkat "elite" tindakan-tindakan saling menindas, menjegal, menfitnah, mengadu domba, menjilat, menghujat, menyuap dan praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tidak segan-segan dilakukan. Kondisi yang disebut terakhir telah menyebabkan dunia internasional memberi "gelar" sebagai negara paling korup di dunia kepada Indonesia setelah India. Sementara itu, di kalangan para pelajar degradasi dan dekadensi moral semakin meningkat.

Melihat kondisi seperti di atas, Muhaimin (*Media Indonesia*, 25/5/2001) menilai, bahwa nilai-nilai dasar masyarakat telah mengalami erosi yang semakin menipis. Nilai-nilai seperti keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, perdamaian, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), kejujuran, toleransi, disiplin, jati diri, hingga rasa kasih sayang, mulai mengering dalam diri insan Indonesia. Dalam GBHN 1999 juga dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia selama ini kurang memberi makna bagi pengembangan kepribadian dan watak peserta didik. Hal ini bisa diamati dengan memudarnya budi pekerti sebagai sikap dan perbuatan lahiriah warga bangsa pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini pihak Depdiknas sangat gencar mendengungkan agar pendidikan budi pekerti kembali diaktifkan di sekolah-sekolah. Meskipun sebagian pengamat, seperti psikolog Mukadis menilai bahwa pencanangan pendidikan budi pekerti tersebut mengulangi konsep Orde Baru yang memaksakan hegemoni dan penyeragaman (*uniformity*), apalagi misalnya yang dimaksud adalah pendidikan moral Pancasila (*Republika*, 8/12/1999).

Di zaman modern ini, tuntutan akan pentingnya pendidikan berdimensi moral memang semakin meningkat. Kesadaran tersebut, menurut Tilaar (1999:74) sudah merupakan kesadaran global, kesadaran seluruh bangsa di dunia, termasuk negara-negara industri maju, seperti Amerika. Kesadaran seperti itu, memang sudah merupakan fitrah manusia yang

cenderung kepada perilaku yang baik (Q.S. 30:30) Buktinya ketika umat manusia di dunia ini terpeleceh ke dalam krisis spiritual dan moral, hati nurani mereka merintih ingin kembali kepada fitrahnya yang suci dan baik itu, seperti yang banyak dialami "manusia modern" sekarang ini. Menjelang akhir abad yang lalu hingga saat ini kajian-kajian yang bermuara pada sufistik semakin semarak di kalangan masyarakat kota metropolitan. Buku-buku yang berkaitan dengan "kecerdasan spiritual dan moral" (*moral and spiritual intelligence*) juga semakin diminati.

Kesadaran dan keresahan seperti digambarkan di atas pula tampaknya yang melatarbelakangi agar didengungkan kembali pendidikan budi pekerti belakangan ini. Meskipun pada era Orde Baru dianggap tidak berhasil dalam membentuk moralitas warga negara pada umumnya dan moralitas para pelajar khususnya. Oleh karena itu, di era reformasi ini intensitas dan kualitas pendidikan budi pekerti harus semakin ditingkatkan, baik kualitas materi maupun proses pembelajarannya. Dengan dimuatnya pendidikan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan nasional tersebut, baik secara implisit maupun eksplisit, menunjukkan bahwa bangsa ini masih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan yang bermuara pada etika-moral dan akhlak. Yang menjadi persoalan adalah pendidikan moral yang mana yang akan diajarkan kepada peserta didik itu.

Konsep dan Materi Dasar Pendidikan Budi Pekerti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) dan Ensiklopedia Nasional Indonesia (1989) dijelaskan bahwa etika adalah istilah dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*, yang artinya kebiasaan, salah satu cabang filsafat yang membicarakan dasar-dasar nilai moral tentang apa yang boleh dan tidak boleh, yang baik atau yang tidak baik, yang pantas dan yang tidak pantas pada perilaku manusia. Perwujudan dan penghargaan terhadap nilai-nilai etika dalam pandangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan perbedaan-perbedaan yang jelas. Hal ini karena dipengaruhi oleh sejarah, wilayah geografis dan lingkungan hidup manusia masing-masing bangsa itu.

Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Suseno (1989: 14) menegaskan bahwa moral adalah bagaimana manusia harus hidup dan bertindak, agar menjadi manusia yang baik, berdasarkan sumber-sumber

ajarannya. Istilah moral umumnya dipergunakan untuk menggambarkan integritas kepribadian seseorang yang secara utuh. Orang yang dianggap bermoral, apabila ia memiliki perilaku dan kepribadian yang baik. Moral juga berarti akhlak, budi pekerti, dan susila.

Akhlak dalam kamus *Munjid* (1989: 164) diartikan tabiat, watak, budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Dalam al-Qur'an terdapat kira-kira 1500 ayat yang mengandung ajaran akhlak (Basyir: 1994: 224). Budi pekerti merupakan istilah yang diambil dari terjemahan kata *ahlaq*, tetapi dari segi substansi dan esensinya, budi pekerti juga terkandung dalam makna etika dan moral. Sedyawati, (1997: 4) dengan mengutip arti kata moral tersebut, mengartikan budi pekerti sebagai adat istiadat, sopan santun, dan perilaku.

Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk terhadap sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada sumber dan standar penilaiannya. Bagi akhlak yang menjadi sumber dan standar penilaiannya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Akhlak sesuai dengan tuntutan hati nurani dan akal sehat (*common sense*) serta sesuai dengan fitrah manusia, karena lebih menjaga eksistensi dan kesucian diri (Basyir: 224). Dalam etika standarnya adalah pertimbangan akal pikiran, sedangkan moral standarnya adalah adat kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat (Asmaran: 1992: 9), termasuk ajaran-ajaran, kumpulan ketetapan, Undang-Undang, peraturan negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, standar penilaian akhlak lebih bersifat universal, etika cenderung sangat subjektif, tergantung pada tingkat pertimbangan akal pikiran manusia, seperti etika orang "awam" berbeda dengan etika orang "tercerahkan". Sedangkan standar moral lebih bersifat lokal dan temporal, kondisional dan situasional, tergantung pada adat kebiasaan masyarakat dan bangsa tertentu.

Berkaitan dengan budi pekerti dalam perspektif pendidikan nasional, tampaknya juga didasari oleh ketiga unsur istilah di atas, etika, moral dan akhlak. Hal ini dapat dipahami dari rumusan budi pekerti dalam buku pedoman pembelajaran pendidikan budi pekerti sebagaimana yang dijelaskan berikut:

- a. Secara leksikal, budi pekerti dalam kosa kata Arab adalah *al-ahlaq*, dalam kosa kata Yunani adalah *ethos*, dan dalam kosa kata Inggris adalah *ethics*, ketiga kata itu mengandung arti tingkah laku, perangai, dan watak.

- b. Secara epistemologi, budi pekerti adalah penampilan diri yang berbudi.
- c. Secara konsepsional, budi pekerti adalah budi yang dioperasionalkan, diaktualisasikan, atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan jati diri individu, keluarga, masyarakat dan bangsa.
- d. Secara operasional, budi pekerti adalah perilaku yang baik yang tercermin dalam kata, perbuatan, pikiran, sikap, perasaan keinginan dan hasil karya (Kurrandik: 1997).

Dalam buku pedoman tersebut dirumuskan sebanyak 86 butir nilai budi pekerti sebagai kerangka acuan. Nilai-nilai budi pekerti tersebut di antaranya meliputi sikap dan perilaku sebagai berikut: berdisiplin, bekerja keras, berani memikul tanggungjawab, berhati lembut, berpikir matang, bertenggang rasa, bijaksana, cerdik, jujur, pemaaf, dermawan, rela berkorban, sportif, adil, hormat, tertib, santun, susila, rendah hati, setia sabar, beriman, bersahaja, menghargai karya orang lain, dan percaya diri (Widodo: 2001 dan Kurrandik: 1997).

Dengan demikian, materi pendidikan budi pekerti dapat dikelompokkan ke dalam empat lingkup kajian, yaitu: diri, keluarga, sekolah, masyarakat dan alam. Keempat lingkup itu dapat dikategorikan sebagai budi pekerti dalam hubungan horizontal. Indikator-indikator konsep budi pekerti itu meliputi: watak (sifat), moral, susila, tata tertib, bijaksana, berpikir kritis dan jernih, cerdik, adat istiadat, lurus dan teguh hati, sopan santun, dan tatakrama yang tercermin pada perilaku (Tumanggor: 2001: 32). Indikator-indikator tersebut lebih mencerminkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Ini mengisyaratkan bahwa penggalian nilai-nilai budi pekerti itu bersumber dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pengertian pendidikan budi pekerti adalah bimbingan dan latihan untuk membentuk tingkah laku yang baik, yang perilaku itu merupakan refleksi dari nilai-nilai mulia. Pendidikan budi pekerti juga berarti pendidikan kepribadian dan sopan santun, dan pendidikan yang membentuk perilaku berdasarkan nilai-nilai moral yang bersifat universal (Boediono: 1999: 111-112). Bila merujuk kepada rumusan pengertian pendidikan budi pekerti ini, yang dimaksud adalah nilai-nilai budi pekerti islami. Sebab nilai universal yang dimaksud itu termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Tinjauan Kritis-Filosofis

Dari uraian tentang konsep dasar dan materi pokok pendidikan budi pekerti yang dipaparkan di atas, dapat ditarik suatu analisis sebagai berikut.

Pertama, secara konseptual pendidikan budi pekerti yang dimaksudkan adalah budi pekerti Islam (*ahlaq al-islam*). Hal ini dapat dipahami dari rumusan pengertian dan pokok-pokok materi (nilai-nilai budi pekerti) yang diajarkan. Kalau memang benar yang dimaksud adalah budi pekerti Islam, maka yang menjadi sumber nilai-nilainya adalah sumber yang universal, al-Qur'an dan as-Sunnah dan lingkup materinya mencakup semua aspek kehidupan manusia, budi pekerti dalam hubungan vertikal dan horizontal. Tetapi pokok-pokok materi pendidikan budi pekerti yang diajarkan di sekolah, budi pekerti dalam hubungan vertikal itu tampaknya terlupakan. Seharusnya hubungan dengan Allah SWT (*hablum minallah*) adalah nilai pendidikan budi pekerti pertama dan utama. Sebab Allah SWT sendiri adalah sumber sifat-sifat yang baik (*al asma' al husna*). Rasulullah SAW sendiri mengajarkan : " Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah". Oleh karena itu, pendidikan budi pekerti idealnya, kata Mulyanto (*Republika: 10-12-1999*) adalah buah dari pemahaman tauhid yang utuh dan komprehensif.

Di samping itu, ditinjau dari perspektif sosial-budaya (*social culture*) bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tidak dimuat nilai budi pekerti dalam hubungan vertikal itu, berarti tidak mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang termuat dalam Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan (*illahiyah*) ini juga menempati posisi pertama dan utama, setelah nilai-nilai kemanusiaan, keberadaban, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Syam (1986: 346) mengungkapkan bahwa nilai-nilai dasar yang telah lama hidup dan berkembang sejak awal peradaban masyarakat Indonesia meliputi :

1. Kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana dan potensial.
2. Kesadaran kekeluargaan, yang berwujud cinta keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan berkesinambungannya generasi.
3. Kesadaran musyawarah-mufakat dalam menetapkan kehendak bersama; ataupun memecahkan masalah-masalah bersama di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4. Kesadaran gotong royong, tolong menolong, semangat bekerja sama sesama tetangga, kampung dan desa.

5. Kesadaran tenggang rasa, atau tepa selira sebagai semangat di dalam kekeluargaan dan kebersamaan; hormat menghormati dan saling memelihara kesatuan, saling pengertian demi keutuhan kekeluargaan ataupun kebersamaan.

Kedua, ditinjau dari segi sumber acuan pengambilan nilai-nilai pendidikan budi pekerti tersebut, tampaknya pendidikan budi pekerti tidak menggunakan sumber nilai yang tegas dan konsisten. Landasan pemikirannya lebih bersifat "sinkretis", yang pada gilirannya mengaburkan visi dan misi pendidikan budi pekerti itu sendiri. Misi pendidikan budi pekerti adalah membiasakan para pelajar dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari berlandaskan nilai-nilai moral. Moralitas mengatur perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif yang berdasarkan nilai-nilai universal. Hal ini berarti, landasan pemikiran filsafatnya harus jelas dan tegas, pasalnya penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya (*multicultural*). Dengan menggunakan sumber nilai yang ideal dan universal mungkin akan lebih dapat diterima oleh kalangan masyarakat Indonesia yang pluralis. Oleh karena itu, jika mau ideal dalam perumusan acuan nilainya, harus ada nilai budi pekerti bersifat umum-universal dan nilai budi pekerti khusus-lokal.

Ketiga, jika merujuk pada materi pembelajaran pendidikan budi pekerti di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (baca: pendidikan budi pekerti SLTP), tampaknya juga lebih mengacu kepada akhlak Islam, yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Kalau demikian, berarti tidak perlu menjadikan pendidikan budi pekerti sebagai mata pelajaran tersendiri. Jika mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri dan terpisah, sebagaimana model kurikulum terpisah (*separated curriculum*) sekarang tentu akan menjadikan kurikulum pendidikan nasional semakin "gemuk". Hal ini akan berimplikasi pada tujuan yang ingin dicapai secara nasional dan instruksional dari mata pelajaran tersebut tidak akan tercapai. Sebab akan berhadapan (*vis a vis*) dengan proses pembelajaran yang tidak efektif dan menjadikan pendidikan budi pekerti putus hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Padahal semua mata pelajaran sarat dengan pendidikan nilai-nilai moral. Artinya secara filosofis, semua mata pelajaran mengandung pendidikan moral. Contoh mata pelajaran Matematika dengan metode analisisnya yang bersifat pasti itu, berarti mengandung nilai-nilai pendidikan kejujuran dan sikap yang konsisten,

menilai secara objektif mana yang salah dan benar. Jika hasil analisisnya dimanipulasi, ketika inilah prinsip moral ilmu ini dihianati. Demikian pula mata pelajaran yang lain, seperti Biologi, Fisika dan seterusnya. Oleh karena itu, pembelajaran ketiga mata pelajaran tersebut bukan sekedar menjadikan peserta didik pandai dan pintar dalam bidang ilmu itu, melainkan juga membimbing dan membina mereka agar menjadi manusia yang beragama dan berbudi pekerti luhur, menghormati nilai-nilai agama dan budaya bangsanya serta bertanggungjawab atas kelangsungan hidup bangsanya.

Kelima, yang perlu diingat adalah jika pola pembelajaran pendidikan budi pekerti mengikuti pola pengajaran dalam bentuk mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran lainnya, maka selamanya tidak akan berhasil membina budi pekerti peserta didik, sebab pasti akan terjebak pada paradigma "pengajaran" bukan paradigma "pendidikan". Pendidikan budi pekerti sebagai pendidikan nilai, bukan pelajaran tentang pengetahuan budi pekerti yang harus dihafal, tapi pendidikan sikap dan perilaku yang memerlukan pengamalan dan pengalaman, sehingga terinternalisasi dan mengkrystal dalam diri peserta didik. Pendidikan budi pekerti adalah integritas antara gerak hati dan aktualisasi sikap dan perilaku individu. Sebab pendidikan budi pekerti berkaitan langsung dengan realitas kehidupan yang ada di masyarakat.

Keenam, menjadikan pendidikan budi pekerti seperti pola mata ajar yang lain justru akan menyuburkan budaya dan sikap basa-basi dan mental hipokrit, sikap moral hanya untuk kepentingan legal-formal dan temporal. Kasus seperti ini sudah dialami pada masa Orde Baru, para pelajar dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT), bahkan hingga para pejabat wajib mengikuti penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), baik dengan pola empat puluh lima jam maupun seratus jam. Realitasnya justru bertolak belakang, sistem Orde Baru telah membentuk moralitas warga negara yang keliru. Oleh karena itu, mengintegrasikan pendidikan budi pekerti ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) adalah kurang tepat. Sebab kedua mata ajar ini adalah pendidikan nasionalisme kebangsaan, bukan pendidikan budi pekerti.

Ketujuh, selama pelaksanaan pendidikan nilai—pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama—tidak menjadi mata pelajaran prioritas

“primadona”, hanya menjadi mata pelajaran sampingan guna menutupi kesan “sebutan pendidikan sekuler”, dari mata pelajaran yang lain, seperti bahasa Inggris, Matematika, Fisika dan seterusnya, dalam sistem pembelajaran di sekolah. Agaknya akan sulit sekali untuk membentuk manusia Indonesia yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Jika kita kembali kepada pendidikan Rasulullah dan para filosof Yunani, seperti Plato dan Aristoteles, yang pertama dan utama diajarkan adalah yang berkaitan dengan ajaran moral, sebab ini adalah dasar bagi pendidikan yang lainnya. Apalah artinya mempunyai sejuta orang pintar dan cerdas, tapi tidak bermoral yang justru akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Penutup

Dengan demikian, gagasan untuk mengintegrasikan pendidikan budi pekerti ke dalam pendidikan agama di sekolah umum adalah merupakan tawaran yang patut dipertimbangkan. Sebab keduanya mempunyai misi yang sama, yaitu membina peserta didik agar menjadi manusia Indonesia yang berakhlak dan beradab serta berbudi pekerti luhur. Yang perlu dipertimbangkan adalah porsi dan penekanan (*stressing*) serta kesesuaian materi keduanya. Secara sederhana mungkin dapat dilakukan dengan pemetaan materi yang seimbang (*balance*), misalnya pendidikan agama lebih mengarah pada internalisasi nilai-nilai aqidah-tauhid, dan pendidikan budi pekerti mengacu pada pembinaan nilai-nilai moral Islam dan Pancasila. Kedua nilai budi pekerti tersebut harus sama-sama sejajar dan sejalan. Dalam proses pembelajarannya, pendidikan budi pekerti harus dapat membangkitkan daya kritis dan kesadaran (*awareness*) peserta didik dengan cara menjelaskan manfaat dan mudharat dari pelaksanaan dan pengingkaran terhadap nilai-nilai budi pekerti.

Namun integrasi kedua mata pelajaran tersebut, secara teknis mungkin mengalami persoalan. *Pertama* adalah persoalan nama mata pembelajarannya. Jika nama mata pelajaran tersebut hanya mencerminkan nama salah satu saja dan tidak mewakili keduanya, maka ada kemungkinan yang satunya tidak terwakili. Oleh karena itu, nama pelajaran harus mencerminkan kedua jenis pelajaran itu. Sebagai gagasan awal misalnya nama mata pelajaran tersebut adalah, pendidikan agama dan budi pekerti. *Kedua* adalah

masalah misi dan tujuan mata pelajaran itu. *Ketiga*, penyusunan materinya. Dalam hal materi, sebenarnya akhlak budi pekerti Islam lebih relevan untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam konteks negara Indonesia yang amat pluralis ini. *Keempat* adalah masalah porsi dan alokasi waktunya. Secara teknis idealnya porsi dan alokasi waktu yang diberikan harus lebih besar kepada mata pelajaran itu dari sebelumnya. Sebab dengan dilakukan integrasi, konsekuensinya materi menjadi lebih luas. *Kelima* adalah masalah proses pembelajarannya, terutama yang berkaitan dengan metode dan pendekatannya.

Pendidikan moral atau akhlak, semisal pendidikan budi pekerti tidak akan banyak berarti jika hanya dengan menggunakan pendekatan rasional dan bersifat hafalan, sebab akhlak bukanlah hafalan semata, tapi lebih merupakan perilaku yang refleksi. Oleh karena itu, pendekatan emosional (*emotional approach*) dapat dipertimbangkan, sebab dalam pendidikan nilai sebenarnya lebih banyak mengembangkan kemampuan otak kanan (*emotional intelligence*).

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim*.
As, Asmaran. 1992. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Rajawali Pers.
Basyir, Ahmad Azhar. 1994. *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Bandung: Mizan.
Ilyas, Yunahar. 2001. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI).
Ma'luf, Louis. 1989. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Ilam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
Muhaimin, Yahya. 2000. “Program Pendidikan Budi Pekerti”, Komentor dalam *Harian Umum Media Indonesia*, 25 Mei 2001.
Mukadis, Sartono. 1999. “Pendidikan Budi Pekerti Ulangi Konsep Orba”, Komentor dalam *Harian Umum Republik*, 8 Desember 1999.
Sedyawati, Edi. 1997. *Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur*. Jakarta: Balai Pustaka.
Supriadi, Dedi. 2001. “Pendidikan Budi Pekerti dalam Sistem Pendidikan Nasional: Perspektif Historis”, Makalah Pada *Acara Temu*

- Konsultasi Pengembangan Budi Pekerti dalam Kurikulum PAI di Sekolah Umum*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam Depag RI.
- Suseno, Franz Magnis. 1989. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Team Penyusun. 1997. *Pedoman Pembelajaran Pendidikan Budi Pekerti*, Jakarta: Pusbang Kurrandik.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1989. Jilid 5 Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Tumanggor, Rusmin. 2001. "Pendidikan Budi Pekerti di luar Mata Pelajaran PAI: Idealisme Yang Salah Jalan", Dalam Jurnal *Jauhar*, No. 1 Vol. 2, PPs IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Widodo. 2000. "Reaktualisasi Pendidikan Budi Pekerti", Artikel dalam *Harian Umum Suara Pembaruan*, 2 Mei 2001.